



**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
KANTOR DESA TANJUNG GUSTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

UMI AIMAH BR SILAEN

1815100268

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR DESA TANJUNG GUSTA

NAMA : UMI AIMAH BR SILAEN
N.P.M : 1815100268
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 06 Oktober 2022



DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si.

Riska Franita, S.E., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Aimah Br Silaen
NPM : 1815100268
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/ AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR DESA TANJUNG GUSTA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalihkan-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 6 Oktober 2022

Pernyataan

Umi Aimah Br Silaen
1815100268

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Aimah Br Silaen

NPM : 1815100268

Fakultas : SOSIAL SAINS

Program Studi : AKUNTANSI

Alamat : Dusun III Jl. Blok Gading Tanjung Gusta, Kec. Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20352

Dengan ini pengajuan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 6 Oktober 2022

Pernyataan

Umi Aimah Br Silaen
1815100268

ABSTRAK

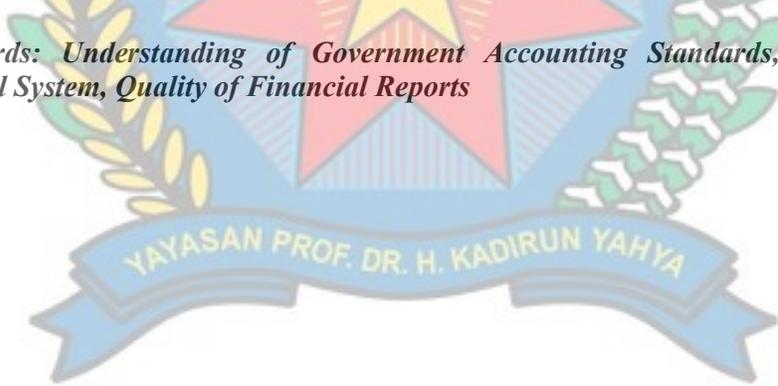
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Desa Tanjung Gusta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 30 responden yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan dengan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan yaitu uji analisis data, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah desa Tanjung Gusta, yang dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,717 < 2,048$). (2) Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Desa Tanjung Gusta, yang dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,593 < 2,048$).

Kata kunci : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRAK

This study aims to determine: the effect of understanding Government Accounting Standards, and Internal Control Systems on the Quality of Local Government Financial Reports at the Tanjung Gusta Village Office. The data collection method in this study used a questionnaire. The number of samples in this study were 30 respondents who were involved in making financial statements with non-probability sampling technique. The technique used is data analysis test, classical assumption test, hypothesis test. The results showed that: (1) Understanding of Government Accounting Standards had no effect on the Quality of Local Government Financial Reports in Tanjung Gusta Village, as evidenced by $r_{\text{arithmic}} < r_{\text{table}}$ ($1.717 < 2.048$). (2) The Internal Control System has no effect on the Quality of the Financial Reports of the Tanjung Gusta Village Government, as evidenced by $r_{\text{count}} > r_{\text{table}}$ ($1,593 < 2,048$).

Keywords: *Understanding of Government Accounting Standards, Internal Control System, Quality of Financial Reports*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis selama menjalankan kewajiban menuntut ilmu dan penyelesaian tugas akhir. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai panutan dalam menerangi jalan kehidupan. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta”***.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr.E. Rusiadi, SE,.M.Si., CIQaR., CIQnR., C selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr.Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukkan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi penulis.
5. Ibu Riska Franita, SE., M.Ak, selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukkan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.

6. Para dosen dan Pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca budi Medan.
7. Kepada Kedua Orang tua saya tercinta, yang selalu mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayang, semangat, begitu banyak materil yang sudah tersalurkan dan dukungan setiap hari serta doa yang tak terhingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih hingga bisa dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kepada Kakak Khairunissa Silaen, dan Adik Pande Raja Silaen yang tiada henti memberi semangat, motivasi, inspirasi, dukungan setiap hari dan tak bosan memberi nasehatnya serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada Sahabat Sahabat saya yang tersayang, teman-teman seperjuangan dan rekan-rekan mahasiswa/i yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan banyak memberi semangat, tukar pikiran, dukungan serta doa selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas ilmiah penelitian ini sangat penulis harapkan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semuanya, Aamiin.

Medan, 6 Oktober 2022

Penulis



Umi Aimah Br Silaen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMA PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN NON PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PERBAIKAN UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Batasan Masalah.....	8
1.3 Perumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah.....	12
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal	23
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	29
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Konseptual	38
2.4 Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis Sumber Data	42
3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Asumsi Klasik.....	48
3.6.1 Uji Prasyarat Analisis	48
3.6.2 Uji Hipotesis	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Kantor Desa Tanjung Gusta	54

4.1.2 Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan Kantor Desa Tanjung Gusta	55
4.1.3 Karakteristik Responden.....	57
4.1.4 Analisis Data	59
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	61
4.1.6 Uji Hipotesis	63
4.2 Pembahasan.....	68
4.2.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	68
4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	69
4.2.2 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	
BIODATA	
SURAT PENELITIAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tanjung Gusta Tahun 2020	5
Tabel 1.2 Pendidikan Staff Kantor Desa Tanjung gusta	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	42
Tabel 3.2 Populasi dan Sampel	43
Tabel 3.3 Instrumen Skala Likert	46
Tabel 3.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	47
Tabel 3.5 Indikator Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	47
Tabel 3.6 Indikator Sistem Pengendalian Internal	47
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Tanjung Gusta.....	56
Tabel 4.2 Karakteristik Responden	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas X1	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas X2	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Y	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Realibilitas	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan	66
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas bisa diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2016).

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto dalam Indra Bastian 2015), untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab.

Melalui otonomi desa, diharapkan desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, serta mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagai subyek pembangunan. Dalam peraturan pemerintah Republik Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Terdapat empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu (a) Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. (b) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. (c) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (d) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai. Kurangnya pegawai pemerintah yang memiliki kompetensi dan juga latar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadi kelemahan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi (Karmila, Tanjung, dan Darlis 2014).

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah juga berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memuat persyaratan tentang standar akuntansi pemerintah yang dapat digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan maka akan timbul berbagai kerugian seperti kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan daerah, dan kelemahan administrasi daerah. Banyak kasus yang terjadi di kantor-kantor pemerintah terutama di kantor desa yang kurang. Bahwa staff yang berada di bagian keuangan masih belum sesuai dengan keahlian dan pendidikan di bidang keuangan. Dan pada kenyataannya masih ada daerah-daerah yang belum mematuhi peraturan pemerintah dan menimbulkan berbagai kerugian.

Pengendalian internal mempunyai peranan yang penting dalam kualitas laporan keuangan. Pemerintah Indonesia memiliki peraturan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah harus berpedoman pada SPIP. Sistem pengendalian internal pemerintah mendapatkan

perhatian cukup besar dari BPK selaku auditor eksternal, BPK mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan pemerintah, kelemahan SPI dapat menjadi peluang yang sangat besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (Nurillah, 2014).

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi yang diimplementasikan pemerintah daerah memiliki keterkaitan dengan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan. Antara standar akuntansi pemerintah dengan sistem akuntansi harus terdapat sinkronisasi dan harmonisasi. Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan standar akuntansi merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut harus disajikan.

Laporan keuangan pemerintah desa tanjung gusta dikelola melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Masih Kurang pemahaman aparatur pemerintah desa tentang PP No, 71 Tahun 2010 yaitu Pedoman pengelolaan keuangan desa menjadikan upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Dan belum sesuai latar belakang pendidikan Staff yang mengelola dan menyusun laporan keuangan di kantor desa tanjung gusta. Seperti yang terjadi di kantor desa tanjung gusta bahwa staff bagian keuangan belum sesuai dengan keahlian dan pendidikannya sehingga Laporan keuangan desa tanjung gusta hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Maka Informasi keuangan pemerintah desa tanjung gusta belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Berikut adalah bentuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 dan latar pendidikan staff kantor Desa Tanjung Gusta :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Gusta

KODE REK	URAIAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31/12/2020		
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /KURANG
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.3	pendapatan lain-lain	0,00	2.513.176.00	2.513.176.00
4.3.6	Bungan Bank	0,00	2.513.176.00	2.513.176.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	2.513.176.00	2.513.176.00
5	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA	22.203.364.00	21.700.000.00	503.364.00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	18.700.000.00	18.700.000.00	0,00
01.01.04	penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	18.700.000.00	18.700.000.00	0,00
5.2	belanja barang dan jasa	18.700.000.00	18.700.000.00	0,00
5.2.2	belanja jasa Honorarium	18.700.000.00	18.700.000.00	0,00
5.2.2.06	belanja jasa honorarium PKPKD dan PPKD	18.700.000.00	18.700.000.00	0,00
01.02	Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa	3.364.000.00	3.000.000.00	3.364.00
01.02.01	penyediaan sarana (Aset Tetap) Pekantoran/Pemerintah	3.364.000.00	3.000.000.00	3.364.00
5.3	Belanja Modal	3.364.000.00	3.000.000.00	3.364.00
5.3.2	Belanja Modal Pegadaan peralatan, Mesin dan Alat B	3.364.000.00	3.000.000.00	3.364.00
5.3.2.04	Belanja modal peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	3.364.000.00	3.000.000.00	3.364.00
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasaran	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.4	Belanja modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
5.3.4.01	Belanja Modal gedung, Bangunan , Taman-Honorer Pelai	0,00	0,00	0,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Upah-Tenag	0,00	0,00	0,00
5.3.4.03	Belanja Modal gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
01.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	500.000.00	0,00	500.000.00
01.04.09	Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &	500.000.00	0,00	500.000.00

5.2	Belanja Barang dan jasa	500.000.00	0.00	500.000.00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	500.000.00	0.00	500.000.00
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	500.000.00	0.00	500.000.00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	10.000.000.00	9.550.00.00	450.000.00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000.00	9.550.00.00	450.000.00
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/instansi Komunik	8.600.000.00	8.500.000.00	100.000.00
5.2	Belanja barang dan jasa	8.600.000.00	8.500.000.00	100.000.00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	8.600.000.00	8.500.000.00	100.000.00
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	8.600.000.00	8.500.000.00	100.000.00
02.06.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi	1.400.000.00	1.050.000.00	350.000.00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.00	1.050.000.00	350.000.00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000.00	1.050.000.00	350.000.00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis kantor dan Benda Pos	335.000.00	0.00	355.000.00
5.2.1.05	belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.065.000.00	1.050.000.00	15.000
	JUMLAH BELANJA	32.203.364.00	31.250.000.00	953.364.00
	SURPLUS/DEFISIT	(32.203.364.00)	(28.736.824.00)	(3.466.540.00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan pembiayaan	32.203.364.00	32.203.364.00	0.00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	32.203.364.00	32.203.364.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTC	32.203.364.00	32.203.364.00	0.00
	SISA LEBIH/ (KURANG)PERHITUNGAN ANGGARAN	0.00	3.466.540.00	(3.466.540.00)

Disebutkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Tabel 1.2 Pendidikan Staff Desa Tanjung Gusta

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Desa	Kawibowo
2.	Sekretaris Desa	Nurmaidah Lestari. SM
3.	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Rahmad Danu
4.	Kaur Perencanaan	Risky Meidini
5.	Kaur Keuangan	Della Karina Iswara. S.Kom
6.	Kasi Pemerintahan	Eka Amelia Pratiwi. S.Kom
7.	Kasi Pelayanan	Ramadhanti Pratiwi. SH

Pada tabel 1.2 menunjukkan latar belakang staff kantor desa Tanjung Gusta, dimana mulai dari kepala desa yang bahkan tidak memiliki latar belakang S1 akuntansi, sekretaris desa bahkan berlatar belakang SM, kaur tata usaha dan umum dan kaur perencanaan juga tidak memiliki latar belakang S1, kaur keuangan dan kasi pemerintah hanya berlatar belakang S.Kom, hingga staff kasi pelayanan berlatarbelakang SH. Hal ini menunjukkan semua staff di kantor Desa Tanjung Gusta tidak ada yang memiliki latar belakang S1 akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan di bahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Informasi keuangan yang disajikan belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
2. Pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi untuk menerapkan sistem akuntansi PP No. 71 Tahun 2010.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta untuk menghindari kesimpang siuran dan kesalahpahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan penelitian ini. Adapun batasan-batasan yang akan diteliti yaitu terfokus pada Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Tanjung Gusta.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Desa Tanjung Gusta?
2. Apakah sistem pengendalian Internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Desa Tanjung Gusta?
3. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah pada Kantor Desa Tanjung Gusta?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pelaporan keuangan pemerintahan dan dapat dikaji lebih dalam mengenai Kualitas Laporan Keuangan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Pemerintah Desa Tanjung Gusta

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Perangkat Desa Tanjung Gusta dalam menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas.

b. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

1.5 Keaslian Penelitian

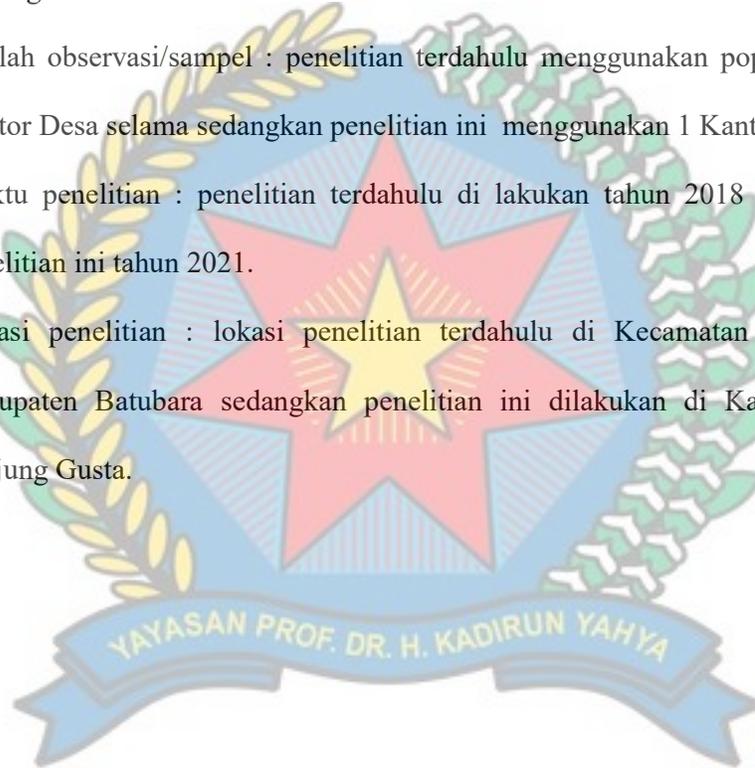
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Indria Nurani Br. Purba (2018) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara”.

Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Model penelitian : penelitian terdahulu menggunakan model penelitian analisis regresi linier sederhana sedangkan penelitian ini menggunakan model penelitian analisis regresi linier berganda.
2. Variabel penelitian : penelitian terdahulu menggunakan satu variabel bebas yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan satu variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan dua variabel

bebas yaitu Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal dan satu variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

3. Jumlah observasi/sampel : penelitian terdahulu menggunakan populasi di 9 Kantor Desa selama sedangkan penelitian ini menggunakan 1 Kantor Desa.
4. Waktu penelitian : penelitian terdahulu di lakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini tahun 2021.
5. Lokasi penelitian : lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tanjung Gusta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Basuki (2007) dalam Emy Pavitasari (2018), menjelaskan bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Siregar (2015) berpendapat bahwa standar akuntansi pemerintah yang berlaku sekarang adalah SAP berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 (PP71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan Laporan Operasional (LO), beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam anggaran negara/daerah.

Menurut Revrison Baswir, akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan

untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Menurut Halim (2013) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah digunakan sebelumnya, sehingga informasi yang ada di dalam laporan keuangan menjadi sangat akurat dan meminimalisir kesalahan.

2.1.1.2 Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah

Berikut ini basis penerapan standar akuntansi pemerintah yang sampai saat ini masih digunakan.

1. SAP Berbasis Kas

SAP berbasis kas ini digunakan oleh pemerintah untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Dengan SAP basis ini, maka Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas

disalurkan ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas Pelaporan. Hal ini tertera dalam PP No.71 Tahun 2010.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

3. Realisasi (*Realization*)

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*fulldisclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar (*fair presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, unsur kehati-hatian diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan. Misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Pusat/Daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 2, maka ruang lingkup yang mencakup Standar Akuntansi Pemerintah yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas menuju akrual/cash toward accrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Adapun ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini mengacu pada kerangka konseptual yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar (Nordiawan:2009). Kerangka konseptual ini membahas:

1. Tujuan kerangka konseptual
2. Lingkungan akuntansi pemerintahan
3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum
6. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi
7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

Adanya laporan keuangan adalah untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Nordiawan:2009) :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

2. Manajemen

Manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, manajemen akan berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Keseimbangan antar generasi bertujuan untuk membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah

generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang tepat guna berdasarkan visi, misi, sasaran serta tujuan yang jelas (mencapai kinerja yang telah direncanakan).

2.1.1.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah di atas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba dan laporan akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Berdasarkan fungsinya, akuntansi pemerintahan dikhususkan untuk lembaga negara yang mana tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi pemerintahan ini berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba. Maka dari itu, dalam laporan keuangannya tidak terdapat laporan laba (*income statement*) dan laporan akuntansi yang berkaitan dengan itu.
2. Akuntansi ini melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintahan juga memungkinkan penggunaannya lebih dari satu dana.
4. Akuntansi pemerintah menggunakan perkiraan laba dan modal yang ditahan di neraca.
5. Akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku.

2.1.1.5 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan tindak lanjut atas Undang-undang keuangan negara. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur basis akuntansi yang digunakan dalam dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Pemberlakuan efektif SAP berbasis akrual untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Namun, bagi entitas yang belum siap melaksanakan basis akuntansi akrual, pemerintah memperbolehkan menerapkan basis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2014. Selanjutnya semua entitas pelaporan diharapkan menggunakan basis akrual penuh mulai tahun anggaran 2015. Perbedaan mendasar antara PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terletak pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh basis kas menuju akrual berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan jika menggunakan basis akuntansi akrual laporan yang dihasilkan lebih banyak, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas.

Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 berlaku bagi seluruh pemerintah daerah. Hal ini dampak dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sedangkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik melalui laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah

merupakan ikhtisar dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

Keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual akan berjalan sebagaimana mestinya, jika didukung dengan pemahaman pegawai keuangan tentang SAP yang memadai. Pegawai keuangan yang memiliki pemahaman SAP mampu mengerti dan menerapkannya dalam setiap aspek bidang pekerjaan yang terkait. Pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharuskan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Orang yang memiliki pemahaman tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan, makna operasionalnya, dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan (Purwanto, 1997) dalam (Afiyah, 2013).

Sedangkan menurut Sudijono (2015) Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pemahaman dan standar akuntansi pemerintahan, maka dapat disimpulkan yang dimaksud pemahaman akuntansi berbasis akrual adalah kemampuan memahami kerangka konseptual, teknik, dan kebijakan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sehingga

mampu menjelaskan, menginterpretasikan, dan menyajikan laporan keuangan yang reliabel dan sesuai dengan standar yang ditetapkan guna pengambilan keputusan bagi pihak terkait.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai, bukan jaminan absolut karena sangat sulit untuk membangun sistem yang sempurna. Disamping itu, Sistem Pengendalian Internal masih mengandung kelemahan dan keterbatasan sehingga masih memungkinkan untuk diterobos dilanggar, dan dilakukan kesalahan Sistem Pengendalian Internal bukanlah sesuatu yang final, tetapi harus selalu diriviu, dievaluasi, diuji, dikembangkan, dan diperbaiki. (Mahmudi,2016).

Menurut Mulyadi (2016) menjelaskan sistem pengendalian internal dirancang dari dua tujuan sistem yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian serta keteran dalam informasi akuntansi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pemimpin lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah pengendalian atas penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Menurut Harlinda (2016) sistem pengendalian internal digunakan untuk memastikan sebuah organisasi mencapai kinerja yang telah ditetapkan, hal ini selaras dengan komitmen dari pemerintah daerah yang terus berupaya mencapai kinerja yang tinggi dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Pavitasari (2018) sistem pengendalian internal merupakan suatu pedoman yang dirancang untuk memberikan jaminan atas keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Artana (2016) sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan mengenai keandalan suatu laporan keuangan sehingga dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut telah dirancang sesuai dengan standar yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal merupakan pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas untuk mencapai tujuan kegiatan instansi pemerintahan. Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian berjalan dengan baik dan memadai maka harus dilakukan pemantauan secara terus menerus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu pedoman yang dirancang untuk memberikan jaminan atas keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2014), tujuan pokok pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Sedangkan, tujuan pengendalian internal menurut Romney (2014) ada empat yaitu:

1. Mengamankan Aset
2. Mengelola catatan dengan baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar
3. Memberikan informasi yang reliable dan akurat
4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional
6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan
7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.3 Komponen Pengendalian Internal

Komponen pengendalian internal menurut COSO dalam Liho et all (2018), yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian internal yang baik, sistem pengendalian intern yang sangat bagus pun tidak dapat dijalankan dengan baik.

Komponen-komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian intern adalah :

- a. Komitmen manajemen terhadap nilai-nilai etika dan integritas (*commitment to ethical values and integrity*). Di dalam suatu perusahaan harus ditanamkan suatu etika dan nilai-nilai etika.
 - b. Gaya operasional yang dipakai oleh manajemen dan filosofi yang dianut oleh manajemen (*Operating style management's and philosophy*). Pentingnya penegakan aturan beserta hukumannya harus diyakinkan oleh manajemen kepada seluruh karyawan agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai aturan.
 - c. Struktur organisasi (*Organizational structure*). Struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan digunakan untuk menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang baik sesuai dengan keinginan manajemen. Dalam penerapannya masing-masing bagian tidak diperbolehkan ada karyawan yang paling berkuasa dalam menangani suatu transaksi dan bagian-bagian tersebut harus bisa diawasi.
 - c. Komite Audit untuk Dewan Direksi (*the audit committee of the board of directors*). Pengawasan oleh komite audit terhadap jajaran tertinggi di perusahaan.
2. Kegiatan pengawasan atau *control activities* Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi Menurut COSO ada beberapa *control activities* yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan (*proper authorization of transactions and activities*)
 - b. Pembagian tugas dan tanggungjawab (*segregation of duties*)
 - c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik (*design and use of adequate documents and records*)
 - d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan (*adequate safeguards of assets and records*)
3. Pemahaman resiko atau *risk assessment*
- Manajemen perusahaan harus bisa mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:
- a. Risiko strategis yaitu mengerjakan sesuatu kegiatan dengan cara yang salah sehingga menyebabkan perusahaan tidak bisa mencapai tujuannya dengan baik.
 - b. Risiko finansial yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan seperti adanya pemborosan dan pencurian uang
 - c. Risiko informasi yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan, informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.
4. Informasi dan komunikasi atau *information and communication* Perusahaan harus mengetahui tugas masing-masing karyawan, contohnya karyawan yang mencatat transaksi penjualan, mengirim tagihan kepada pembeli dan yang

menerima uang pembayaran. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat melacak karyawan yang cenderung untuk melakukan kecurangan.

5. Pemantauan atau *monitoring*

Pemantauan adalah ketika suatu kegiatan berjalan tidak sesuai apa yang diharapkan dapat diambil tindakan secepatnya. Bentuk pemantauan di perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu (atau semua) prosedur berikut ini:

- a. Supervisi yang efektif (*effective supervision*) yaitu, melakukan pembimbingan terhadap karyawan.
- b. Akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) yaitu, melakukan penerapan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, departemen maupun proses yang dijalankan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar karyawan dapat bekerja dengan baik.

2.1.2.4 Fungsi Pengendalian Internal

Dilaksanakannya pengendalian internal tentunya memiliki fungsi, dibawah ini terdapat fungsi pengendalian internal menurut Romney (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian preventif (*preventive control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan sebelum masalah tersebut timbul. Contohnya yaitu, dibuatnya peraturan-peraturan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
2. Pengendalian detektif (*detective control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan untuk mendeteksi permasalahan yang telah timbul. Contohnya yaitu, melakukan pengauditan secara berkala.

3. Pengendalian korektif (*corrective control*) yaitu, pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memulihkannya dari kesalahan tersebut. Contohnya yaitu, melakukan perbaikan sistem yang rusak

2.1.2.5 Unsur-Unsur Pengendalian Secara Umum

Ada beberapa unsur sistem pengendalian internal yaitu:

1. Struktur yang mampu memisahkan tanggungjawab fungsional secara jelas dan tegas. Misal dalam akuntansi harus ada dua orang yang bertugas secara berbeda yaitu orang yang menerima transaksi dan orang yang mencatat transaksi keuangan.
3. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan. Contoh pengendalian internal kas perusahaan.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat. Misalnya memberikan hak cuti dan adanya aktivitas audit administrasi.
5. Mutu karyawan yang mampu mengemban tanggung jawabnya. Misalnya menciptakan tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan semua fungsi usaha (keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain). Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami

oleh pemakai informasi.

Dalam konteks keuangan daerah laporan keuangan ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Laporan keuangan harus tersaji secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau pun pemerintah daerah lain.

Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Kualitas LKPD adalah laporan keuangan yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan (andal relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Tujuan laporan keuangan melalui penyajian informasi akuntansi diwujudkan melalui ukuran-ukuran normatif karakteristik laporan keuangan tersebut. Kualitas informasi LKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yakni :Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, serta sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang

2.1.3.2 Konsep Pengungkapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas memiliki tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan yaitu :

1. Cukup (*adequate*)

Pengungkapan yang cukup mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

2. Wajar (*fair*)

Wajar merupakan pengungkapan informasi agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi pemakai laporan keuangan.

3. Lengkap (*full*)

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya menyajikan semua informasi yang relevan. Maksud dari pengungkapan secara lengkap ini bukan berarti memuat semua informasi sehingga mengaburkan substansi itu sendiri, tetapi adalah informasi yang disajikan itu penting, bersifat wajar, cukup dan mampu menjelaskan secara meyakinkan.

2.1.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. berikut merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan:

1. Relevan (*Relevant*)

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal (*Reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan (*Comparability*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami (*Understandability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunadan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan SKPD yaitu :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Wiley (2002) dalam Sulistyowati (2017), Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

2. Teknologi Informasi Yang Digunakan

Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (training, misalnya) yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi.

3. Rekonsiliasi

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengungkapkan bahwa :
”Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

2.1.3.5 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan yang memiliki manfaat dan digunakan untuk tujuan umum, laporan keuangan harus memuat informasi yang memenuhi syarat dan sesuai dengan standar sehingga

laporan keuangan menjadi berkualitas. Laporan Keuangan pemerintah Daerah dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang ada didalamnya dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh pengguna. Laporan Keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yang mungkin mempengaruhi adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penyusun laporan keuangan dapat meminimalisir kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem Pengendalian Internal juga merupakan dasar yang harus dilakukan dalam pergerakan roda organisasi. Sistem Pengendalian Internal merupakan tolak ukur pengujian efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai pada Kualitas Laporan Keuangan. Pemahaman standar akuntansi pemerintah serta didukung dengan Sistem Pengendalian Internal yang memadai maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada table berikut :

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Indria Nurani Br.	Pengaruh Sistem Pengendal	Sistem Pengenda lian	Kualitas Laporan	Regresi Linier	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem

	Purba (2018)	ian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara	Intern Pemerintah (Spip)	Keuangan	Sederhana	pengendalian Intern pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2	Deni Yuwilia Wardani (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Labuhanbatu)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Labuhanbatu)	Asosiatif Kausal	Hasil penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan batu, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, tetapi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

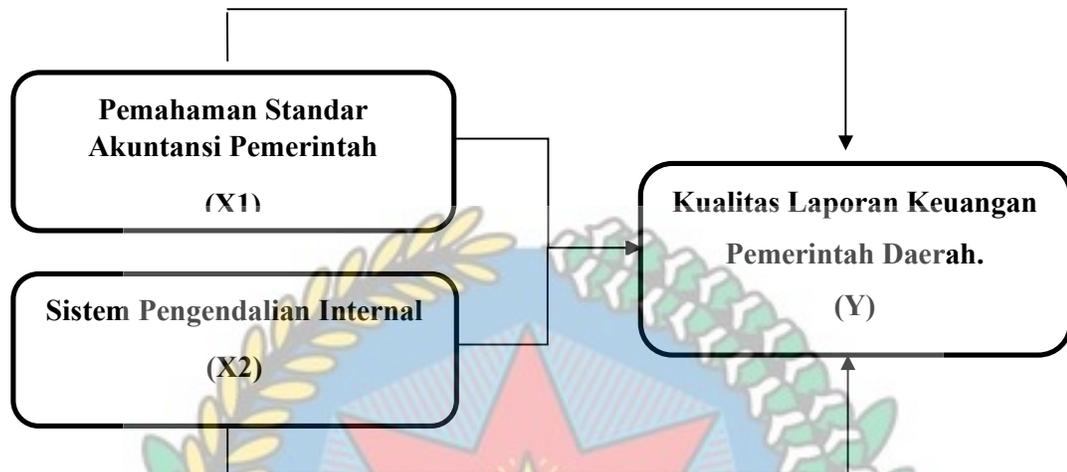
						Labuhan batu.
3	Surohman (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Pemahaman Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Metro	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Pemahaman Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Metro	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Pemahaman Akuntansi, dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Metro.
4	Khoirina Kencana Ningrum (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,	Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Kuesioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

5	Eka Widyanti (2014)	Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Jabodetabek.	sistem pengendalian internal, pemanfaatan Teknologi Informasi,	Kapasitas Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Jabodetabek.	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kapasitas Auditor internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah se-jabotabek, baik secara parsial maupun secara simultan.
---	---------------------	--	--	--	------------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar hubungan diatas dapat di lihat melalui kerangka di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dimana :

X1 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (variabel bebas)

X2 = Sistem Pengendalian Internal (variabel bebas)

Y = kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (variabel terikat)

2.4 Hipotesis

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik. Sistem informasi keuangan daerah dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan sistem pengendalian internal (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Maka Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta
2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta
3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Desa Tanjung Gusta.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salahsatu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Tanjung Gusta yang terlibat Objek dalam penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan keuangan Desa Tanjung Gusta. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah Aparatur Pemerintah Desa Tanjung Gusta yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini dimulai pada bulan

Desember 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini :

Table 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi

No	Kegiatan Penelitian	Juni'22				Juli'22				Agust'22				Sept'22				Okt'22			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	Riset awal/Pengajuan judul																				
02	Penyusunan proposal																				
03	Seminar Proposal																				
04	Perbaikan/ Acc Proposal																				
05	Pengolahan Data																				
06	Penyusunan Skripsi																				
07	Bimbingan Skripsi																				
08	Seminar Hasil																				
09	Sidang Meja Hijau																				

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa Tanjung Gusta yang berjumlah 30 orang. Dalam penelitian ini, populasi sasaran dipilih dengan teknik *populative sampling* atau seluruh populasi dijadikan populasi sasaran. Berdasarkan teknik tersebut, maka populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Pemerintah Desa Tanjung yang berjumlah 30 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi dari keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang

diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani dan Hendrayadi, 2015).

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *nonprobability sampling*, dengan metode sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*).

Tabel 3.2 Populasi Penelitian

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Desa	Kawibowo
2.	Sekretaris Desa	Nurmaidah Lestari
3.	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Rahmad Danu
4.	Kaur Perencanaan	Risky Meidini
5.	Kaur Keuangan	Della Karina Iswara
6.	Kasi Pemerintahan	Eka Amelia Pratiwi
7.	Kasi Pelayanan	Ramadhanti Pratiwi
8.	Kasi Kesejahteraan Pelayanan/Pembangunan	Ferianto Manurung
9.	Kepala Dusun I	Siti Aminah Matondang
10.	Kepala Dusun II Timur	Andi Anto
11.	Kepala Dusun II Barat	Chairuzen Nasution
12.	Kepala Dusun III	Nurfitriadi
13.	Kepala Dusun IV Timur A	Edison Gultom
14.	Kepala Dusun IV Timur B	Tenaga Sembiring
15.	Kepala Dusun IV Barat A	Bangkit Purba
16.	Kepala Dusun IV Barat B	Id.Tambunan
17.	Kepala Dusun V	Surya Darma
18.	Kepala Dusun VI	Wahono Putra
19.	Ketua LKMD	Fachruddin, SH
20.	Sekretaris	Mulyadi
21.	Bendahara	Nurhayati
22.	Seksi Agama	Drs.Ridwan
23.	Seksi Seni Kebudayaan	Zainab
24.	Seksi Pembangunan & Perekonomian	Sujeni
25.	Seksi Lingkungan Hidup & Bapeldas	Yuni Wanto Hutagalung
26.	Seksi Pemuda Olahraga & Kesehatan	Wahyudi
27.	Seksi Polmas Babinsa	- Aiptu Arios - Sertu Heryanto
28.	Seksi Kesehatan Kependudukan KB	Siti Zauwiyah
29.	Seksi PKK	Tety

Sumber : data kantor desa tanjung gusta, 2022

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Data tersebut kemudian dianalisis dan diolah dengan analisis statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Dalam penelitian ini, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) merupakan variabel terikat atau dependen. Kualitas Laporan Keuangan dapat mencerminkan apakah pelaporan keuangan daerah tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan 4 indikator, yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Instrumen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Ni Made Sudiaranti (2015) yang terdiri dari 13 pernyataan

3.4.2 Variabel Independen

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah harus mengacu pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan adanya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan akan menghasilkan informasi akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan laporan keuangan daerah guna mewujudkan

pemerintahan yang baik. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) diukur menggunakan 8 indikator, yaitu: (1) basis akuntansi, (2) realisasi, (3) konsistensi, dan (4) penyajian laporan keuangan. Instrumen penelitiannya berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Nurlaila (2014) yang terdiri dari 9 pernyataan.

2. Sistem Pengendalian Internal (X_2)

Sistem Pengendalian Internal merupakan pedoman bagi pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Internal (X_2) diukur menggunakan 5 indikator, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, dan (4) pemantauan. Instrumen penelitiannya berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Octarindra (2016) yang terdiri dari 9 pernyataan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono: 2014). Kuesioner yang disebarkan berupa pernyataan tertulis mengenai Kualitas Laporan Keuangan, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal. Masing - masing variabel memiliki jumlah pernyataan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kuesioner disertai dengan surat izin melakukan penelitian pada instansi tersebut. Setelah 1 minggu kuesioner akan diambil kembali oleh peneliti. Waktu yang dibutuhkan oleh responden untuk mengisi kuesioner tersebut adalah 5 sampai dengan 7 menit.

3.5.1 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Alat tes yang akan digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah soal tes berupa soal pilihan ganda kepada sampel untuk dikerjakan secara individu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup. Responden hanya perlu memberikan tanda *checklist* (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan.

Pengukuran masing-masing variabel menggunakan perhitungan skor sebagai berikut :

Tabel 3.3 Skala Likert

		Skor Penilaian
SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemahaman Standar Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal diukur menggunakan skala likert dengan empat opsi jawaban.

Terdapat tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah. Angket disajikan dalam 31 pernyataan. Berikut merupakan kisi-kisi dari instrumen penelitian yang digunakan:

a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)				
1	Indikator	Sub indicator	No Item	Jumlah

2	Relevan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki manfaatumpun balik • Memiliki manfaatprediktif • Tepat waktu • Lengkap 	1 2 3 4	4
3	Andal	<ul style="list-style-type: none"> • Jujur • dapat diverifikasi • netralitas 	5 6,7 8,9	5
4	Dapat Dibandingkan		10,11	2
5	Dapat Dipahami		12,13	2
Total Jumlah				13

b. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Tabel 3.5 Indikator Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah			
No	Indikator	No Item	Jumlah
1	Basis Akuntansi	1,2,3	3
2	Realisasi	4,5,6	3
3	Konsistensi	7	1
4	Penyajian laporan Keuangan	8,9	2
Total Jumlah			9

c. Sistem Pengendalian Internal

Tabel 3.6 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)			
No	Indikator	No Item	Jumlah
1	Lingkungan Pengendalian	1,2,3	3
2	Penilaian risiko	4,5	2
3	Kegiatan pengendalian	6,7	2
4	Pemantauan	8,9	2
Total Jumlah			9

3.5.2 Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas Menurut Ghozali (2016) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan

Produk Moment Pearson. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Menurut Ghozali (2016) adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dalam penelitian ini dalam menguji reliabilitas masing-masing instrumen penulis menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α).

3.6 Teknik Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Linearitas

uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2016). Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Untuk mengetahui linieritas data dapat digunakan dengan menggunakan *uji test of linearity* dengan taraf signifikansi 5%, sehingga jika nilai signifikansi *linearity* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut linear, jika dibawah 0,05 maka data tersebut tidak linear.

b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dilaksanakan setelah memenuhi asumsi klasik, tujuannya adalah agar variabel independen sebagai estimator atas variabel independen tidak bias. Pengujian ini meliputi uji

normalitas, uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas Adapun penjelasan masing-masing uji asumsi klasik adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal, dilakukan analisis grafik dengan “Melihat normal probability report plot yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggantikan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.”

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

Untuk melakukan uji ini, didasarkan pada model yang diuji dan pedoman pengambilan keputusannya didasarkan pada :

- Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 , distribusi data normal

- Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 , distribusi tidak normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal

Probability Plots dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel

independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan

dua cara yaitu: 1) nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor*

(VIF). Jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala

multikolinieritas (Ghazali, 2016).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan ragam dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika ragam dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika ragam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model

regresi yang baik adalah homokedastisitas. (Ghazali, 2016).

Untuk melakukan uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Jika terjadi pola tertentu yang membentuk pola teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homokedastisitas.

3.6.2 Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Ghazali (2016) menjelaskan bahwa analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua.

1) Persamaan Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

A : Nilai konstanta

B : Koefisien regresi

x_1 : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

x_2 : Sistem Pengendalian Internal

B : Kesalahan regresi

2) Mencari Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya

hubungan antara dua variabel independen secara bersama- sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif yang ada.

3) Mencari Koefisien Determinasi Berganda R

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk menghitung besarnya kontribusi variabel kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien determinasi juga menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. Koefisien determinasi dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi R.

4) Mencari Signifikansi pengaruh dengan Uji F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika F_{hitung} sama dengan atau lebih besar dari F_{tabel} maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

5) Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen atau bebas secara individual dalam mengukur

variasi variabel dependen terkait. Jika nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individu berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Kantor Desa Tanjung Gusta

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut turunannya berupa Peraturan dan Peraturan Menteri bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak, hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah jelas. Pelaksanaan Pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik dibidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

RPJM Desa Tanjung Gusta ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM desa tersbut nantinya akan menjadi

dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (Good Governance) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.

Pada zaman penjajahan Belanda, mulainya nama Desa Tanjung Gusta adalah Kampung Manggusta. Timbulnya sebutan Kampung Manggusta oleh orang-orang Belanda disebabkan karena banyaknya pohon - pohon manggis disekitar Daerah Tersebut. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka nama Kampung Manggusta berubah menjadi Desa Tanjung Gusta oleh masyarakat setempat saat ini. Kemudian pada Tahun 1953 dipilihlah seorang Kepala Kampung yang Bernama Bapak Yahya Somet Surbakti.

4.1.2 Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan Desa Tanjung Gusta

a. Struktur Organisasi Desa Tanjung Gusta

Di dalam sebuah lembaga Desa pasti memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan utama suatu organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada, manajemen akan lebih mudah mengontrol terlaksananya sebuah pekerjaan yang ada dan melaksanakan pengawasan yang baik atas semua kegiatan yang menyangkut semua fungsi organisasi. Adapun Struktur organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Gusta yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Struktur organisasi Desa Tanjung Gusta

No.	Jabatan	Nama Jabatan
01	Kepala Desa	Kawibowo
02	Sekretaris Desa	Nurmaidah Lestari, S.M
03	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Rahmad Danu
04	Kaur Perencanaan	Risky Meidini
05	Kaur Keuangan	Della Karina Iswara, S.KOM
06	Kasi Pemerintahan	Eka Amelia Pratiwi, S.KOM
07	Kasi Pelayanan	Ramadhanti Pratiwi, S.H
08	Kasi Kesejahteraan Pelayanan/Pembangunan	Ferianto Manurung
09	Kepala Dusun I	Siti Aminah Matondang
10	Kepala Dusun II	Andi Anto
11	Kepala Dusun III	Chairuzen Nasution
12	Kepala Dusun IV	Nurfitriadi
13	Kepala Dusun IV Timur A	Edison Gultom
14	Kepala Dusun IV Timur B	Tenaga Sembiring
15	Kepala Dusun IV Barat A	Bangkit purba
16	Kepala Dusun IV Barat B	Id. Tambunan
17	Kepala Dusun V	Susya Darma, SE
18	Kepala Dusun VI	Wahono Putra
19.	Ketua LKMD	Fachruddin, SH
20.	Sekretaris	Mulyadi
21.	Bendahara	Nurhayati
22.	Seksi Agama	Drs.Ridwan
23.	Seksi Seni Kebudayaan	Zainab
24.	Seksi Pembangunan & Perekonomian	Sujeni
25.	Seksi Lingkungan Hidup & Bapeldas	Yuni Wanto Hutagalung
26.	Seksi Pemuda Olahraga & Kesehatan	Wahyudi
27.	Seksi Polmas Babinsa	- Aiptu Arios - Sertu Heryanto
28.	Seksi Kesehatan Kependudukan KB	Siti Zauwiyah
29.	Seksi PKK	Tety

b. Maksud Desa Tanjung Gusta

- 1) Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- 2) Sebagai wujud realisasi dari impleentasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa berikut dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri serat yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Desa baik di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

- 3) Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

c. Tujuan Desa Tanjung Gusta

- 1) Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Tanjung Gusta
- 2) Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- 3) Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan
- 5) Sebagai media Informasi
- 6) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realisasi serta capaian Pembangunan Desa.

4.1.3 Karakteristik Responden

Dari 31 kuisisioner yang diolah, gambaran umum 30 responden yang terinci pada tabel 4.1 dilihat dari jenis kelamin responden, pria 16 orang (53%) dan wanita 14 orang (47%), artinya sebagian besar responden adalah pria. Dilihat dari tingkat pendidikan responden, S2 0 orang (0%), S1 6 orang

(20%), Diploma 0 orang (0%) dan SMA/SMK 24 orang (80%), hal ini berarti sebagian besar responden adalah tamatan SMA/SMK yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK dan mampu untuk memahami pertanyaan dalam kuesioner dan berkompeten dalam memberikan jawaban. Serta dilihat dari lamanya responden bekerja, kurang dari 5 tahun sebanyak 8 orang (27%), 5-10 tahun 10 orang (33%) dan lebih dari 10 tahun 12 orang (40%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah bekerja selama lebih dari 10 tahun yang berarti bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

No	Kriteria	Jumlah	Persen
1	Jenis Kelamin :		
	Pria	16	53%
	Wanita	14	47%
	Total	30	100%
2	Pendidikan:		
	S2	0	0%
	S1	6	20%
	D3	0	0%
	SMK/SMA	24	80%
	Total	30	100%
3	Lama Bekerja :		
	< 5 Tahun	8	27%
	5– 10 Tahun	10	33%
	> 10 Tahun	12	40%
	Total	30	100%

Sumber : Desa Tanjung Gusta

4.1.4 Analisis Data

4.1.4.1 Uji Validitas

Pedoman suatu instrumen/pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai minimum r_{tabel} adalah 0,361 (Sugiyono, 2016). Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari 3 (tiga) variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan 30 sampel responden.

Tabel 4.3

Uji Validitas Variabel X₁ (Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah)

Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Kesimpulan
X _{1.1}	0.697	0,361	Valid
X _{1.2}	0.597	0,361	Valid
X _{1.3}	0.689	0,361	Valid
X _{1.4}	0.573	0,361	Valid
X _{1.5}	0.681	0,361	Valid
X _{1.6}	0.597	0,361	Valid
X _{1.7}	0.689	0,361	Valid
X _{1.8}	0.573	0,361	Valid
X _{1.9}	0.773	0,361	Valid

Sumber : olah data SPSS, 2022

Tabel di atas menunjukkan variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai kriteria valid untuk setiap pertanyaan.

Tabel 4.4

Uji Validitas Variabel X₂ (Sistem Pengendalian Internal)

Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Kesimpulan
X _{2.1}	0.881	0,361	Valid
X _{2.2}	0.899	0,361	Valid
X _{2.3}	0.898	0,361	Valid
X _{2.4}	0.881	0,361	Valid
X _{2.5}	0.882	0,361	Valid
X _{2.6}	0.874	0,361	Valid
X _{2.7}	0.886	0,361	Valid
X _{2.8}	0.889	0,361	Valid
X _{2.9}	0.899	0,361	Valid

Sumber : Olah Data SPSS, 2022

Tabel di atas menunjukkan variabel Pengendalian Internal mempunyai kriteria valid untuk setiap pertanyaan.

Tabel 4.5

Uji Validitas Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)

Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Kesimpulan
Y1	0.705	0,361	Valid
Y2	0.670	0,361	Valid
Y3	0.733	0,361	Valid
Y4	0.705	0,361	Valid
Y5	0.702	0,361	Valid
Y6	0.670	0,361	Valid
Y7	0.708	0,361	Valid
Y8	0.682	0,361	Valid
Y9	0.715	0,361	Valid
Y10	0.702	0,361	Valid
Y11	0.670	0,361	Valid
Y12	0.708	0,361	Valid
Y13	0.682	0,361	Valid

Sumber : Olah data SPSS, 2022

Tabel di atas menunjukkan variabel Kualitas Laporan Keuangan mempunyai kriteria valid untuk setiap pertanyaan.

4.1.4.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada di atas 0,60. Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk 3 (tiga) variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.6

Uji Relibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
X ₁ (Pemahaman SAP)	0,685	Reliabel
X ₂ (Pengendalian Internal)	0,899	Reliabel
Y (Kualitas Laporan Keuangan)	0,714	Reliabel

Sumber : olah data SPSS, 2022

Tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,685; sistem pengendalian internal sebesar 0,899; dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,714. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan mampu

memperoleh data yang konsisten yang berarti apabila pertanyaan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan = 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas p dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016)

- Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.
- Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas
YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000
	Std. Deviation	1.15396906
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.094
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		.674
Asymp. Sig. (2-tailed)		.755

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.7, diketahui nilai probabilitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,755. Karena nilai probabilitas p , yakni 0,755, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05, hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

4.1.5.2 Uji Multikolinieritas

Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Varibel	Kualitas Laporan Keuangan	
	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
X ₁ (Pemahaman Standar Akuntansi Publik)	0.602	1.301
X ₂ (Pengendalian Internal)	0.543	1.266

Sumber: olah data SPSS, 2022

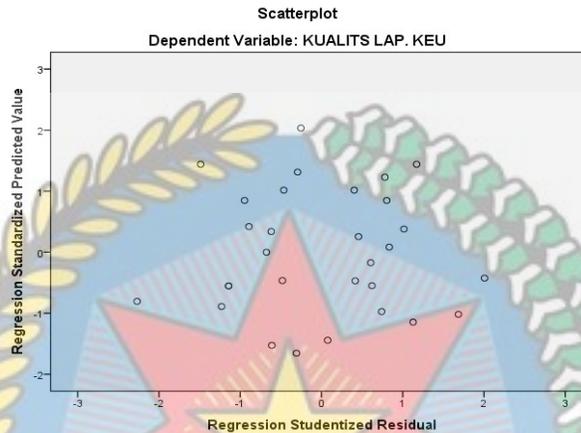
Berdasarkan tabel 4.8 di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* >0,1 dan nilai *variance inflation factor* <10 untuk setiap variabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Ghozali (2016) menyatakan dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.1

Hasil Uji Heterokedastisitas



Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4. 1 , tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 4.9

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients ^a	
	B	Standar Error
Constant	2.969	3.663
Pemahaman SAP	0.098	0.092
Pengendalian Internal	0.072	0.067

a. Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,969 + 0,098X_1 + 0,072X_2 + e$$

1. Konstanta (a) = 2,969 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) sama dengan 2,969.
2. Koefisien $X_1(b_1) = 0.098$, menunjukkan bahwa variabel pemahaman SAP (X_1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Artinya jika pemahaman SAP ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat sebesar 0.098 (9,8%).
3. Koefisien $X_2(b_2) = 0.072$, menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal (X_2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Artinya jika pengendalian internal ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat sebesar 0.072 (7,2%).

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara Pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan adalah hubungan yang positif dimana ketika Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian internal ditingkatkan maka akan berdampak pada kenaikan kualitas laporan keuangan.

4.1.6.2 Uji Parsial (t)

Uji - t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya. Jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresinya negative, berarti variabel independen berpengaruh negative terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10

Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a		
Model	T	Sig
Constant	0.811	.425
Pemahaman SAP	1.717	.062
Pengendalian Internal	1.593	.074

a. Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Olah data SPSS, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat :

- a. Pengaruh variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) dalam kualitas laporan keuangan pemerintah Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,717 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 30 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} <$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_1 (1,717) lebih kecil dari t_{tabel} (2,048) maka keputusanya H_a ditolak, artinya bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan dalam proses Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- b. Pengaruh variabel Pengendalian Internal (X_2) dalam kualitas laporan keuangan pemerintah Dari tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,593 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 30 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} <$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan signifikan. Karena t_{hitung} untuk variabel X_2 (1,593) lebih kecil dari t_{tabel} (2,048) maka keputusanya H_a ditolak,

artinya bahwa variabel Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan dalam proses Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

4.1.6.3 Uji Simultan

Uji statistik F merupakan kelayakan model/alat uji statistik untuk menunjukkan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% (0,05).

Tabel 4.11

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	210.182	2	50.091	47.476	.000 ^b
Residual	38.618	27	1.430		
Total	248.800	29			

a. Dependent Variable: KUALITS LAP. KEU

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN SAP, PENGENDALIAN INTERNAL

Sumber : Olah data SPSS, 2022

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} adalah sebesar 47,476. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($sig < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan, terlihat pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi (0,00) lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya adalah signifikan. Artinya H_a diterima yang menunjukkan secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk nilai F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 47,476 adapun untuk nilai F_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 30, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2 dan variabel terikat sebanyak 1 dan

taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 4,21 maka F_{hitung} (47,476) lebih besar dari F_{tabel} (4,21) sehingga keputusan H_a diterima, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Pemahaman Standar akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan.

4.1.6.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. dalam penelitian ini uji determinan dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pemahaman Standar akuntansi pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal dalam kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tabel 4.12

Hasil Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.319 ^a	.345	.333	1.196

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN SAP, PENGENDALIAN INTERNAL

b. Dependent Variable: KUALITS LAP. KEU

Sumber : Olah data SPSS, 2022

Tabel 4.12 menunjukkan nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,333. Hal ini menandakan bahwa variasi variabel pemahaman SAP dan Sistem Pengendalian Internal dapat menjelaskan 33,3% variasi variabel kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan sisanya, yaitu 66,7 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini, misalnya variabel pemanfaatan sistem informasi komputer, pelatihan, pengalaman kerja, dan kompetensi sumber daya manusia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai signifikan sebesar 0,062 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,717 < 2,048$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut bertentangan dengan konsep Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada umumnya yang menyatakan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kantor desa tanjung gusta disebabkan laporan keuangan yang di sediakan oleh kantor desa tanjung gusta hanya menyediakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan staff di kantor desa tanjung gusta juga tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska Binaturina dkk (2018) yang mengatakan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikan sebesar 0,074 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,593 < 2,048$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Interna 1 tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut bertentangan dengan konsep

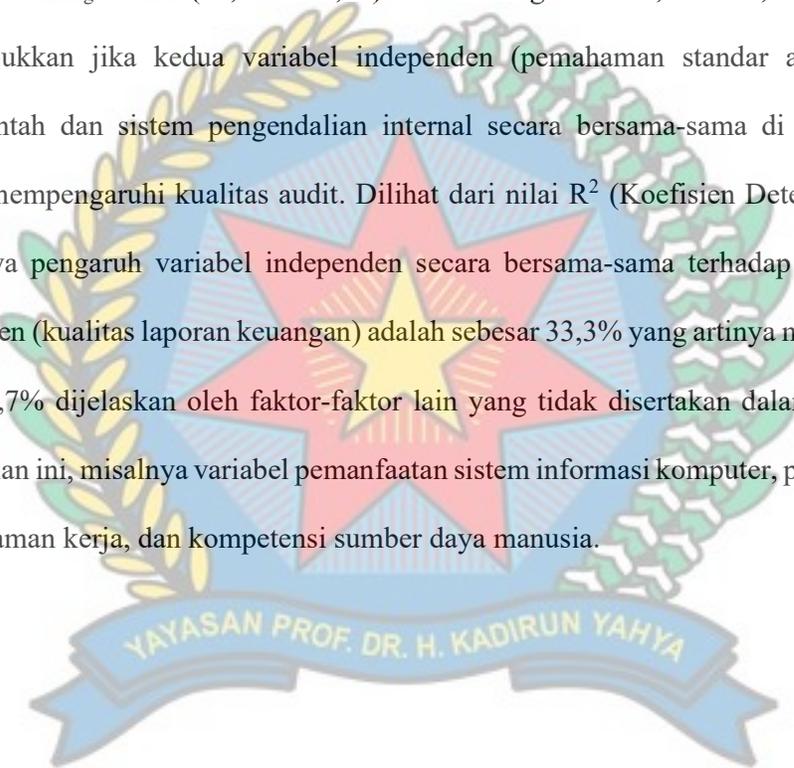
Pengendalian Internal pada umumnya yang menyatakan bahwa secara teoritis, sistem pengendalian internal adalah proses untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah yang tercemin dari keteladanan, efisiensi, dan efektivitas dari pelaporan keuangan. Semakin baiknya lingkungan pengendalian dalam menerapkan standarisasi proses kerja, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Tidak berpengaruhnya sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan kemungkinan disebabkan oleh responden yang diambil adalah periviu laporan keuangan, karena itu pemahaman tentang sistem pengendalian internal tidak membawa dampak terhadap signifikan kualitas laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan reviu laporan keuangan pemerintah daerah pemahaman tentang sistem pengendalian internal tidak untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melainkan untuk meningkatkan proses reviu laporan keuangan daerah oleh inspektorat. Berdasarkan pemendagri No. 4 tahun 2008 bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, tidak mempunyai wewenang untuk mengaudit atau menguji kelima unsur pengendalian internal secara mendetail sehingga tidak bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yensi dkk (2020) yang mengatakan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.2.3 Pengaruh Pemahaman Standan Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dilihat dari nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($47,476 > 4,21$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan jika kedua variabel independen (pemahaman standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama di jalankan dapat mempengaruhi kualitas audit. Dilihat dari nilai R^2 (Koefisien Determinasi) besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan) adalah sebesar 33,3% yang artinya masih ada sisa 66,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini, misalnya variabel pemanfaatan sistem informasi komputer, pelatihan, pengalaman kerja, dan kompetensi sumber daya manusia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Karena para pegawai atau aparatur keuangan kurang memahami tentang standar akuntansi pemerintah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang baik.
2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Pengendalian Internal yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Desa Tanjung Gusta.
3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Tanjung Gusta.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian pemahaman SAP, diharapkan Pemerintah Desa Tanjung Gusta mampu meningkatkan keualitas laporan keuangan pemerintah, sebaiknya dinas lebih memperhatikan pegawainya untuk bisa memahami standar akuntansi pemerintah (SAP), dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang benar akan mampu membuat kualitas laporan yang berkualitas. Kantor Desa Tanjung Gusta juga harus merekrut pegawai yang paham akan Standar Akuntansi Keuangan agar kedepannya

Laporan Keuangan kantor Desa Tanjung Gusta dapat memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Berdasarkan hasil penelitian, Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan Desa Tanjung Gusta, hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Misalnya Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pelatihan, pengalaman kerja, dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survei berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambahkan jumlah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono. (2015). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Rajawali Pers.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penetapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*". Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol 24 No. 1. Universitas Islam Riau.
- Angelicca, Maya. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah*. Skripsi Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Arlia Sari, 2016. "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Cipmawati Mohunc. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)*". Jurnal.
- CV Alfabeta. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 7, No. 2 2015.
- Eka, Lilik Handaya, Astika Rahmawati, I Wayan Mustika. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20 No. 2 2018.
- Emy Pavitasari, (2018), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Stand
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanaffi, R. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati)*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi ahmad. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor, in media.
- Liho Christian Jeanry, Pangemanan Sifrid, Pusung Rudy. (2018) Analisis Pengendalian Internal Committee Of Sponsoring Organizationns Terhadap Piutang Usaha Pada CV. Kombos Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2)*, 2018, 683-692
- Mahmudi, (2016), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . Edisi Ketiga, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Marshall B, Romney dan Paul John Steinbart, 2014 *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information System* (Edisi 13), Prentice Hall.
- Mulyadi, (2016). *Sistem Akuntansi*. Penerbit : Salemba Empat Jakarta Selatan.
- Nadhira. 2016 Skripsi Akuntansi : *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajaemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Desa di Wilayah Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang)*".
- Nurlaila. (2014). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Lapran Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Nurun Nafidah. 2015. Skripsi Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : *Pengaruh Kinerja Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Pada Perpustakaan Universitas Indonesia*.
- Oktarina, Mia, Kharis Raharjo, dan Rita Andini, 2016. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang", *Journal Of Accounting*.
- Pamungkas, R. T. (2017). *Gubernur Ganjar Puji Penataan Kota Semarang dan Pengembangan Kawasan Industri Kendal*. www.tribunnews.com. Akses tanggal 13 November 2017.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Salahudin. (2018). Penerapan Standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual pemerintah daerah pada kabupaten maros. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukmaningrum, T. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sulistyoati Ratna Indah, (2017). Pengaruh Kualitas Sdm Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Udi Kuncoro. 2017 Skripsi Akuntansi Universitas Lampung : *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.